ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wacana legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar laut Tangerang dengan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough (2003) serta teori legitimasi dan delegitimasi van Leeuwen (2007). Penelitian ini berfokus pada analisis strategi legitimasi dan strategi delegitimasi, faktor sosio-kultural yang memengaruhi praksis wacana legitimasi dan delegitimasi, keberpihakan pihak yang melakukan delegitimasi terhadap aturan tata ruang, serta latar belakang ideologis yang melandasi praktik wacana tersebut. Data penelitian berupa tuturan para aktor yang direpresentasikan melalui pemberitaan media massa terkait konflik pagar laut Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana legitimasi direalisasikan melalui strategi otorisasi, rasionalisasi, dan evaluasi moral yang digunakan untuk membingkai pagar laut sebagai tindakan yang rasional, bermanfaat, serta berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat pesisir. Sementara itu, wacana delegitimasi direalisasikan melalui regulasi dan aturan hukum, evaluasi moral negatif, penyangkalan otoritas, penyangkalan rasionalisasi, dan narasi negatif yang digunakan untuk membangun representasi penolakan terhadap pembangunan pagar laut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak yang melakukan delegitimasi, khususnya pemerintah, memperlihatkan keberpihakan terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kewenangan negara dalam pengelolaan ruang laut melalui penggunaan regulasi sebagai sumber legitimasi institusional. Praksis wacana legitimasi dan delegitimasi dipengaruhi oleh posisi sosial aktor, motif yang melatarbelakangi tindakan mereka, serta konteks institusional, situasional, dan historis yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak setara (unequal power relations). Selain itu, hasil analisis menunjukkan berdasarkan wacana legitimasi dan delegitimasi tersebut, bahwa ideologi yang digunakan adalah ideologi ekonomi liberalis, dan hegemoni digunakan oleh aktor sosial untuk membangun *common sense* yang berbeda dalam membungkai narasi pagar laut. Dalam perspektif *language in new capitalism* Fairclough (2002), wacana legitimasi dan delegitimasi membangun narasi yang rasional untuk menormalisasi kepentingan dalam konflik pagar laut Tangeang.

Kata Kunci: Legitimasi, Delegitimasi, Analisis Wacana Kritis, Fairclough. Pagar laut Tangerang

ABSTRACT

This study aims to analyze the discursive practices of legitimation and delegitimation in the Tangerang maritime boundary conflict using Fairclough's (2003) Critical Discourse Analysis framework and van Leeuwen's (2007) theory of legitimation and delegitimation. This study focuses on the analysis of legitimation and delegitimation strategies, the socio-cultural factors influencing the discourse practices of legitimation and delegitimation, the stance of those engaging in delegitimation toward spatial planning regulations, and the ideological background underpinning these discourse practices. The research data consists of the discourses of the actors as represented through mass media coverage of the Tangerang sea wall conflict. The results indicate that legitimizing discourse is realized through strategies of authorization, rationalization, and moral evaluation used to frame the sea wall as a rational, beneficial action oriented toward the collective interests of the coastal community. The discourse of delegitimization is carried out through regulations and legal provisions, negative moral evaluations, denial of authority, denial of rationalization, and negative narratives used to construct representations of opposition to the construction of the marine fence. The research findings also indicate that those engaging in delegitimization, particularly the government, demonstrate a commitment to the Regional Spatial Planning (RTRW) regulations and the state's authority in managing maritime space through the use of regulations as a source of institutional legitimacy. The discourse practices of legitimization and delegitimization are influenced by the social positions of the actors, the motives underlying their actions, as well as the institutional, situational, and historical contexts that reveal unequal power relations. Furthermore, the analysis reveals that, based on these discourses of legitimization and delegitimization, the ideology employed is liberal economic ideology, and hegemony is utilized by social actors to construct differing common senses in unraveling the narrative of the Tangeang maritime boundary. From the perspective of Fairclough's (2002) "language in new capitalism," discourses of legitimization and delegitimization construct rational narratives to normalize interests in the Tangeang sea fence conflict.

Keywords: Legitimization, Delegitimization, Critical Discourse Analysis, Fairclough, Tangerang sea wall